

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis yang telah dilakukan selama pelaksanaan program magang di lingkungan Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian tata ruang (layout) masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pertama, kondisi tata ruang saat ini menunjukkan bahwa penataan ruangan dilakukan tanpa perencanaan spasial yang sistematis. Tidak terdapat keterpaduan antar unit kerja, baik dari segi lokasi maupun fungsi. Beberapa ruangan penting seperti ruang arsip, penyidik, dan administrasi diletakkan berjauhan dan tidak memiliki akses yang efisien, sehingga memperlambat proses kerja dan menghambat koordinasi.

Kedua, layout ruang belum didesain berdasarkan analisis kebutuhan operasional. Pemanfaatan ruang dan perabotan terkesan tidak proporsional, di mana beberapa ruangan terlalu padat dan lainnya kosong tanpa fungsi yang jelas. Selain itu, tidak tersedia fasilitas pendukung seperti ruang tunggu untuk tamu/saksi atau ruang diskusi tim, yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kerja operasional yang dinamis.

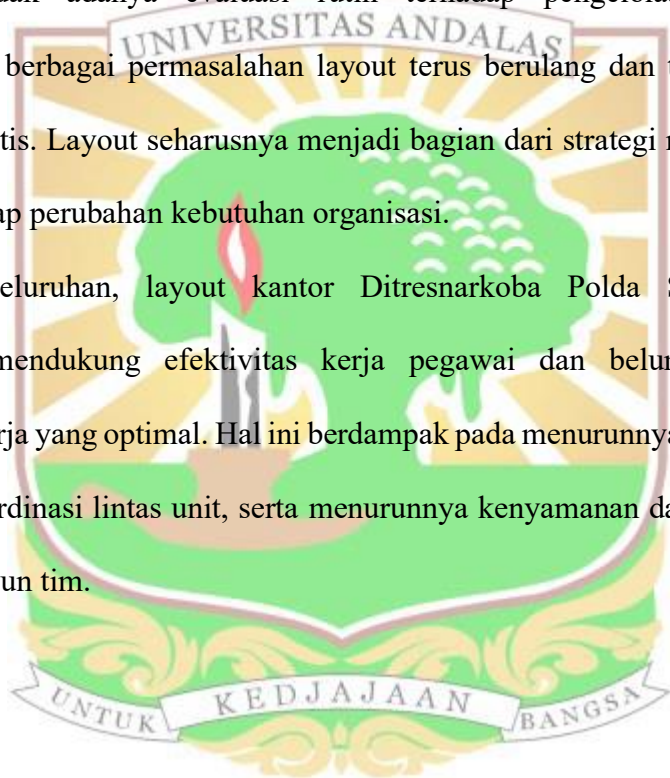
Ketiga, layout yang tidak ergonomis menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Ruang yang sempit, kurang ventilasi, pencahayaan yang buruk, dan

penempatan peralatan kerja yang tidak strategis berdampak negatif pada kesehatan, kenyamanan, serta motivasi kerja pegawai.

Keempat, belum adanya sistem zonasi ruang menyebabkan pencampuran antara area kerja internal dengan area publik. Hal ini tidak hanya berpotensi mengganggu privasi kerja, tetapi juga berisiko terhadap kebocoran informasi dan pelanggaran prosedur keamanan.

Kelima, tidak adanya evaluasi rutin terhadap pengelolaan tata ruang menyebabkan berbagai permasalahan layout terus berulang dan tidak tertangani secara sistematis. Layout seharusnya menjadi bagian dari strategi manajerial yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, layout kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar belum sepenuhnya mendukung efektivitas kerja pegawai dan belum memberikan lingkungan kerja yang optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya efisiensi kerja, lemahnya koordinasi lintas unit, serta menurunnya kenyamanan dan produktivitas individu maupun tim.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan pengembangan tata ruang kantor yang lebih efektif, yaitu:

1. Perencanaan Ulang Tata Ruang Berbasis Alur Kerja

Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur kerja dan fungsionalitas tiap unit untuk kemudian menjadi dasar dalam

menyusun tata ruang baru. Denah ruang sebaiknya disesuaikan dengan intensitas koordinasi dan tingkat kebutuhan interaksi antar unit kerja, sehingga mobilitas pegawai dapat berjalan lebih efisien.

2. Penerapan Sistem Zonasi Ruang

Perlu diterapkan zonasi ruang berdasarkan kategori aktivitas, seperti zona kerja internal, zona publik (untuk tamu/saksi), zona penyimpanan (arsip), dan zona pelayanan. Pemisahan ini akan menjaga kerahasiaan data, meningkatkan kenyamanan kerja, serta membatasi akses pihak eksternal ke area sensitif.

3. Pengadaan dan Penataan Fasilitas Pendukung

Kantor sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang sesuai, seperti ruang tunggu khusus untuk tamu, ruang briefing/koordinasi internal, serta ruang penyimpanan arsip yang aman dan mudah diakses. Penempatan peralatan kerja bersama juga perlu ditata ulang agar dapat digunakan secara efisien oleh seluruh personel.

4. Perbaikan Kondisi Fisik Ruang

Aspek pencahayaan, sirkulasi udara, dan kebersihan ruang harus menjadi perhatian utama. Diperlukan penataan ulang perabotan agar pegawai memiliki ruang gerak yang cukup dan bekerja dalam kondisi yang nyaman secara fisik dan psikologis. Ventilasi dan pencahayaan alami juga perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja.

5. Penyusunan Kebijakan Evaluasi dan Monitoring Layout

Pihak manajemen perlu menetapkan kebijakan evaluasi berkala terhadap efektivitas layout. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan

pegawai, pengamatan langsung, dan diskusi kelompok. Hasil evaluasi sebaiknya dijadikan dasar dalam mengambil keputusan perbaikan tata ruang secara berkelanjutan.

6. Pelibatan Pegawai dalam Perencanaan Tata Ruang

Untuk memastikan bahwa layout benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka proses perencanaan sebaiknya melibatkan perwakilan dari berbagai unit kerja. Dengan demikian, aspirasi pegawai dapat tersalurkan dan hasil perencanaan akan lebih sesuai dengan kebutuhan aktual mereka.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan tata ruang di lingkungan Ditresnarkoba Polda Sumbar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendukung tercapainya tujuan institusi secara optimal.

